



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
**UNIT KERJA** : PIMPINAN TERTINGGI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : YOHANIS BASSANG
2. Jabatan : BUPATI
3. NHK : 179735

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.175.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 37500 m2/37500 m2 di KAB / KOTA MIMIKA, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 24700 m2/1000 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 580 m2/580 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 486.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
2. MOBIL, HINO DUTRO TRUCK Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI (LIGHT TRUCK) TRUCK Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. MOBIL, SUZUKI FUTURA PICK UP Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
5. MOBIL, TOYOTA KIJANG PICK UP Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
6. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
7. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 188.000.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.950.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	5.000.000
Sub Total	Rp.	6.804.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.804.000.000

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.